

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN
DOKUMENAMDAL OLEH PT ALAS SANGGORO YASA
CONSULTANS DENGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr.**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN
DOKUMEN AMDAL OLEH PT ALAS SANGGORO YASA
CONSULTANS DENGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) dr SADIKIN”**

(Siti Lauriyanti Imran, 2020122015, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 117 halaman, Pembimbing
Dr. Rembrandt, SH.MPd., dan Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.MH)



Pembangunan RSUD dr Sadikin Pariaman diawali dengan pembuatan dokumen AMDAL. Pembuatan dokumen AMDAL dimaksud dilakukan oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans. Untuk itu dibuatlah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman sebagai pihak pertama dengan pelaksana pengadaan barang dan jasa yakni PT Alas Sanggoro Yasa Consultans sebagai pihak kedua. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, pihak pertama telah melakukan wanprestasi terkait dengan jangka waktu pembayaran kepada pihak kedua. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini meliputi teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer serta diperkuat dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan perjanjian kerjasama pembuatan dokumen AMDAL oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans Dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi Perjanjian kerjasama dibuat secara di bawah tangan sehingga jika dibuat secara otentik maka dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, dan dapat menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaannya, faktor yang mempengaruhi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah pembayarannya tanpa uang muka, dan pelaksanaannya mulai tanggal 8 September 2020 dan selesai tanggal 18 Desember 2020. Namun pada saat pemenuhan prestasi oleh debitur mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal 3 Mei 2021. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran dikarenakan APBD yang belum cair atau sudah tutup buku pada tahun 2020 sehingga dana APBD tidak dapat dicairkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Kata kunci : Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi, AMDAL

**IMPLEMENTATION OF AGREEMENTS CREATIONS OF AMDAL
BETWEEN PT. ALAS SANGGORO YASA CONSULTANTS WITH THE
GOVERNMENT OF PARIAMAN CITY IN CONSTRUCTING REGIONAL
PUBLIC HOSPITAL dr. SADIKIN**

**(Siti Lauriyanti Imran, 2020122015, Master of Notarial Law, Law Faculty of
Andalas University, 117 pages, Supervisor
Dr. Rembrandt, SH.MPd., dan Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.MH)**

ABSTRACT

The construction of Dr. Sadikin Pariaman Hospital begins with the preparation of an AMDAL document. The AMDAL document was prepared by PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants. For this reason, a cooperation agreement was made between the Pariaman City Government as the first party and the executor of the procurement of goods and services, namely PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants as the second party. However, in implementing the cooperation agreement, the first party has defaulted regarding the term of payment to the second party. Against this background, the problem in this study is about how the agreement is executed and what factors influence the occurrence of defaults, as well as how to resolve them. Theories used as analytical tools in this study are legal certainty theory and legal protection theory. This research used empirical juridical approach using primary data and strengthened by secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that: the implementation of the cooperation agreement for the preparation of AMDAL documents by PT Alas Sanggoro Yasa Consultants with the Pariaman City Government in its implementation there were several problems and obstacles encountered. The cooperation agreements was made privately, and if it was made authentically, it can provide legal certainty for both parties and can be used as strong evidence when there is a default. In its implementation, the factors that affect the default on the agreement are the payment without down payment, and the implementation starts on September 8, 2020 and ends on December 18, 2020. However, when the fulfillment of the achievement by the debtor experienced a delay in payment until May 3, 2021. Constraints faced in implementation the agreement is that there is a delay in payment because the APBD has not been disbursed or the books have closed in 2020 so that the APBD funds cannot be disbursed by the Pariaman City Government.

Keyword: Cooperation Agreement, Default, AMDAL